

Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia.

Santi Rahma Dewi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Email: santirahma.d@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan apakah terdapat fenomena Fly Paper Effect di masing-masing daerah yang diteliti. Penelitian ini mengambil sampel kabupaten dan kota yang ada di Indonesia sejumlah 112 kota dan kabupaten dari 516 kota dan kabupaten yang ada di wilayah Indonesia. Data sekunder diperoleh dengan mengunduh data dari laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Menggunakan tehnik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Fenomena Fly Paper Effect terjadi di beberapa Kota dan Kabupaten yang ditunjukkan nilai koefisien DAU lebih besar daripada PAD, sedangkan DAK hanya diterima Kota dan Kabupaten tertentu yang membutuhkan pembangunan insfrastruktur yang tinggi.

Kata kunci : PAD, DAU, DAK, Fly Paper Effect.

Abstract

This study aimed to measure how the influence of PAD, DAU, DAK to BD and whether there is a Fly Paper Effect phenomenon in each area studied. This study takes sample of the existing districts and cities in Indonesia of 112 cities and districts of 516 regency and cities in Indonesia. Secondary data is obtained by downloading the data from the Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. The techniques of analysis data was used multiple linear analysis. The results of this study that PAD, DAU, DAK simultaneously affect the BD. The Fly Paper Effect phenomenon occurs in several cities and districts where the DAU coefficient value is greater than PAD, whereas DAK is only accepted by certain cities and districts that require high infrastructure development.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Fly Paper Effect.

Pendahuluan

Ditetapkannya peraturan tentang otonomi daerah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan UU No. 32 Tahun 2004, dimana Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan yang dalam hal ini pendelegasian tugas dari pemerintah pusat adalah transfer dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber utama adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).

Pengaturan dana perimbangan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan atas prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang harus diperiksa dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dalam penyelenggaraan kinerja dan keuangan pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh kepentingan masyarakat" (Mardiasmo, 2005).

Penyusunan APBD, pemerintahan memerlukan perencanaan dalam rangka mendapatkan APBD yang sesuai, efisien dan tepat sasaran, hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mencapai tiga misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas terhadap pengelolaan sumber daya daerah. (2) Peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (3) Pemberdayaan dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Yang tidak dapat dihindari adalah munculnya pengaruh global dan komunikasi yang semakin modern menyebabkan masyarakat semakin kritis sehingga meningkatkan tuntutan akan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengeluaran public secara keseluruhan kepada masyarakat (akuntabilitas eksternal). Oleh karena adanya tuntutan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat maka sangat diperlukan laporan

akuntabilitas pemerintah yang transparan dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Opini publik atau pihak tertentu akan menjadi penilaian keberhasilan atau kegagalan kebijakan public yang telah dijalankan. Tuntutan untuk melakukan akuntabilitas internal ini memberikan pengaruh terhadap perbaikan kinerja internal organisasi, termasuk dalam hal keuangan sehingga mendorong tuntutan untuk melakukan akuntabilitas secara internal. Dewasa ini pemerintah menekankan pada perbaikan dan peningkatan kinerja sebagai pertanggungjawabannya terhadap masyarakat.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang didalamnya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat (Pempus) akan melakukan transfer Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sebagian daerah Dana Bagi Hasil yang didalamnya merupakan pajak dan sumber daya alam, disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain.

Dalam praktiknya, transfer dana dari Pempus merupakan sumber dana utama bagi Pemda untuk pembiayaan operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda "dilaporkan" di dalam perhitungan APBD. "Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri" (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).

Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah banyak yang mengangkat permasalahan transfer ini, "di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah" (Fischer, 1996).

"Di Negara Afrika selatan persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85%, 67% hingga 95% di Nigeria, dan 70% hingga 90% di Meksiko. Akan tetapi sangat disayangkan, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya hanya didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan

kolektibilitas pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).

Di Indonesia, saat ini, sesuai dengan UU No. 33/2004, transfer yang dalam hal ini sering disamakan istilahnya dengan DAU harus ditetapkan sekurang-kurangnya senilai 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri Neto yang telah ditetapkan dalam APBD.

Menurut Halim (2002a) dalam Maimunah 2009 bahwa "Pemda kabupaten/kota yang berada di wilayah Pulau Jawa dan Bali mempunyai kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten atau kota di wilayah luar Pulau Jawa- dan Bali". Sedangkan menurut Maimunah (2009), "karena adanya perbedaan karakteristik untuk Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa-Bali, dilakukan penelitian yang menghasilkan bahwa besaran DAU dan PAD mempengaruhi besaran belanja daerah kota/kabupaten di Pulau Sumatera, serta terbukti terjadinya flypaper effect pada belanja daerah serta tidak ada perbedaan flypaper effect antara kota/kabupaten yang PAD-nya tinggi ataupun rendah".

Menurut data yang diambil dari APBD tahun 2010 (per 25 Juni 2010) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, terlihat ternyata banyak daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 50 persen. Beberapa kabupaten tersebut terdapat di wilayah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sebuah temuan di Kabupaten Magetan di Jawa Timur dan Tasikmalayadi Jawa Barat merupakan dua daerah dengan porsi belanja gaji pegawai sebesar 75 persen dari APBD. Dibawahnya kabupaten yang memiliki alokasi gaji pegawai sebesar 74 persen terdiri dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; Klaten, Jawa Tengah; Tanah Datar, Sumatera Barat. Temuan ini menjadi suatu hal yang mendasari keingintahuan peneliti tentang adanya Pengaruh Flypaper Effect , DAU, DAK dan PAD terhadap belanja daerah di Kota/ Kabupaten di wilayah Indonesia

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data-data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang menunjukkan nilai dari besaran atau variabel yang mewakilinya. Sedangkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dan biasanya didapat dari pihak kedua yang mengolah data untuk keperluan orang lain. Data-data sekunder ini diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami dengan bantuan media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan maupun data-data dari perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang dipergunakan adalah data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah. Data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di penelitian ini adalah dengan mengunduh data sekunder dari laman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan tahun 2006-2010

Teknik Penentuan Sampel

Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah Kota / Kabupaten di Indonesia dengan data keuangan yang ada di Direktorat Jenderal Perimbangan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tahun 2006 hingga tahun 2010. Populasi yang ada adalah 1997 kota/kabupaten.

Sampel

Berdasarkan data kabupaten dan kota yang ada pada tiap tahun ada pemekaran kota dan kabupaten sehingga peneliti mengambil sampel kabupaten dan kota secara acak berdasarkan kelengkapan data yang ada. Sampel yang akan diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006-2010. Dengan jumlah sampel sebesar 121 kota/kabupaten, hal ini dikarenakan ada beberapa data yang kurang lengkap sehingga mengharuskan peneliti untuk menyaring data agar didapatkan data yang homogen dan lengkap.

Pengukuran Variabel

Dana Alokasi Umum (X_1)

Dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dalam prosentase tertentu dialokasikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam pembiayaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diperhitungkan dari pendapatan dalam negeri neto. (UU RI NO 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun Anggaran 2012). Data didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diambil melalui internet.

Dana Alokasi Khusus (X_2)

Dana alokasi khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dalam kebijakan tertentu dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu bertujuan untuk membantu pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan yang disesuaikan dengan prioritas nasional, yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (UU RI NO 22 Tahun 2011 Tentang APBN

Tahun Anggaran 2012). Data didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan "Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diambil melalui internet.

PAD (X₃)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. "PAD adalah pendapatan daerah yang bersangkutan dan diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya" (Ibnu Syamsi, 1993 : 202 dalam Maimunah, 2009). Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kualitas otonominya. PAD diharapkan secara terus menerus dan berkesinambungan dapat meningkat secara riil. Data didapatkan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diambil melalui internet.

Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan suatu fenomena dalam suatu kondisi saat Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih besar berasal dari transfer(grants) atau spesifiknya pada transfer yang tidak bersyarat atau unconditional grants dibandingkan dengan pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga berakibat kepada pemborosan dalam realisasi Belanja Daerah. Unconditional grants (transfer dana) yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum yang ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi dasar yang telah dialokasikan dengan menyeluruh (lump sum) dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah (Y)

Belanja Daerah merupakan sejumlah anggaran pengeluaran baik yang langsung maupun yang tidak langsung terkait dan berhubungan dengan suatu program atau kegiatan.

Analisa Data

Uji Outlier

“Outliers adalah data yang muncul memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi”, (*Hair, dkk, 1995 dalam Sumarsono, 2007*).

Pendeteksian outlier

(*Solimun, 2001 dalam Sumarsono, 2007*) yang menjelaskan bahwa “outliers dapat dianalisis dengan diagram kotak garis (box plot), apabila terdapat titik di luar batas pagar (dalam output software komputer) dan umumnya dilambangkan dengan * yang mengindikasikan terdapat data pencilan (outliers). Atau dengan cara lainnya adalah dengan melihat mean dan standard deviationnya”.

“Pengujian univariat outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas yang akan dijadikan outlier dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke dalam standard score atau Z-Score” (*Ferdinand, 2002 dalam Sumarsono, 2007*). Nilai terstandar memiliki rata-rata (Mean) nol dengan standar deviasi (SD) sebesar satu. Batas nilai z-score menurut *Hair dkk (1998)* berada pada rentang 3-4.

“Pemeriksaan terhadap multi outlier dapat dilakukan dengan uji jarak Mahalanobis pada tingkat $p < \alpha$ ” (*Solimun, 2004, dalam Sumarsono, 2007*). “Jarak Mahalanobis dievaluasi dengan menggunakan χ^2 pada derajat kebebasan (df) sejumlah variabel yang digunakan dalam penelitian” (*Ferdinand, 2002 dalam Sumarsono, 2007*). Data yang tidak memiliki multi outlier jika Mahalanobis Distance tidak lebih besar dari χ^2 .

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Hasil dari analisis berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien diperoleh dengan memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regresi sederhana dan Regresi berganda yang dipakai secara

bersamaan untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan dibawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = a + b_1 DAU_{1i} + e \quad (1)$$

$$Y_i = a + b_2 DAK_{2i} + e \quad (2)$$

$$Y_i = a + b_3 PAD_{3i} + e \quad (3)$$

Regresi linier berganda dengan 3 variabel bebas X_1, X_2, X_3 metode kuadrat kecil akan memberikan hasil bahwa koefisien-koefisien a, b_1, b_2, b_3 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum y &= na + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 \\ \sum X_1 y &= a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 \\ \sum X_2 y &= a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 \end{aligned}$$

(sumber: Sugiyono, 2009; 279)

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu situasi dimana ada beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika ternyata terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya :

1. Koefisien-koefisien regresi yang dihasilkan menjadi tidak akan dapat ditaksir.
2. Nilai standar error yang ada di setiap koefisien regresi nilainya akan menjadi tak terhingga.

Sehingga semakin besar koefisien korelasi diantara sesama variabel independen, maka akan meningkatkan kesalahan dari koefisien regresi yang semakin besar berakibat semakin besar pula standar errornya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas antara variabel adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*,

“Dimana R_i^2 merupakan koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan dari salah satu variabel bebas X_i terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas” (Gujarati, 2003: 362).

Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan koefisien 5% dari derajat bebas (dk) = $n - k - 1$, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas dari daerah penerimaan dan penolakan hipotesis penelitian. Tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 0,05 atau 5% karena sudah dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

Uji F

Digunakan dalam menguji cocok atau tidaknya model regresi yang dihasilkan untuk mengetahui pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Y . Prosedur uji F dengan kriteria sebagai berikut :

- a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (model regresi yang dihasilkan tidak cocok)
 $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ (model regresi yang dihasilkan cocok)
- b. Level Signifikan (α) = 0.05
- c. Kriteria Pengujian :
 - Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - Jika nilai probabilitas (P value) / signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Deskriptif

Dari data-data yang diperoleh dari penelitian terhadap Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja daerah dari tiap-tiap Kabupaten dan Kota se-Indonesia, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Analisis Dana Alokasi Umum

Pada DAU dari hasil penelitian dan pengumpulan data didapatkan 114 sampel dari total 121 yang telah dilakukan trimming (penghapusan data) karena terjadi pencilan data dimana data tersebut tidak dapat digunakan sebagai data penelitian. Data Dana Alokasi Umum untuk 112 Kabupaten dan Kota terlampir.

DAU tertinggi dari sampel tersebut diterima oleh Kabupaten Ciamis yang terletak di provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 722.834.000.000,- , sedangkan DAU terendah diterima oleh Kabupaten Kutai yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 6.609.000.000,-. Besaran DAU untuk tiap kota/kabupaten ini dihitung memakai rumus/formulasi statistik yang cukup kompleks, diantaranya adalah dengan variabel jumlah penduduk serta luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.

Dimana jumlah yang diterima sudah menjadi keputusan Presiden sedangkan untuk menghitung besarnya DAU yang diberikan diatur dalam peraturan pemerintah. Jumlah DAU yang ada dihasilkan dari perbandingan antara tingkat kebutuhan dengan tingkat kemampuan tiap kota/kabupaten dalam potensi penerimaan daerah, sehingga untuk daerah dengan kemampuan kecil akan mendapat DAU yang relative besar dan sebaliknya daerah dengan kemampuan besar akan mendapatkan DAU relative kecil. Akan tetapi dari data yang didapatkan nilai DAU yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ternyata tidak selalu sesuai dengan besar kecil kemampuan ataupun potensi daerah, hal ini dapat dilihat dari data.

Tabel 1
Hasil Analisa Deskriptif

	Belanja Daerah Tahun 2010	DAU Tahun 2010	DAK Tahun 2010	PAD Tahun 2010
Rata-rata	391,631.510	33,674.659	290,507.873	14,884.500
Tertinggi	1,141,212.562	321,588.807	722,833.940	49,143.750
Terendah	40,572.154	703.325	21,652.538	0.000

Sumber: data diolah

Analisis Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi (transfer dana) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan disesuaikan dengan prioritas nasional.

Berdasarkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksudkan dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain,

seperti: kebutuhan di daerah transmigrasi, kebutuhan untuk beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan yang terpencil, kebutuhan saluran irigasi primer, serta saluran drainase primer (utama); dan (ii) kebutuhan yang merupakan suatu komitmen atau prioritas di tingkat nasional. DAK tertinggi dari sampel tersebut diterima oleh Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua sebesar Rp. 49.144.000.000,- sedangkan DAK terendah diterima oleh Kabupaten Badung Provinsi Bali sebesar Rp. 1.085.000.000,- (data terlampir).

Implementasi konsep DAK di Indonesia juga mencakup alokasi dana yang dipakai untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya dialokasikan berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada Pemerintah Daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan dari Pemerintah Pusat untuk melibatkan Pemerintah Daerah sebagai penghasil DR di mana kegiatan reboisasi tersebut merupakan salah satu kegiatan yang telah menjadi prioritas nasional. Dari hasil penelitian yang menjadi keterbatasan peneliti karena kurangnya sumber, sehingga tidak benar-benar mengetahui peruntukan Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing kota/kabupaten.

Analisis Pendapatan Asli Daerah

“PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya” (Ibnu Syamsi, 1993 : 202 dalam Maimunah, 2009). Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kualitas otonominya. PAD diharapkan secara terus menerus dapat meningkatkan secara riil.

PAD tertinggi dari sampel tersebut dicapai oleh Kabupaten Badung Provinsi Bali sebesar Rp. 730.073.000.000,- , sedangkan PAD terendah dicapai oleh Kabupaten Supriori Provinsi Papua sebesar Rp. 493.000.000,- (data terlampir).

Analisis Flypaper Effect

Flypaper Effect yang didapatkan dengan membandingkan DAU dengan belanja daerah maka diperoleh data untuk Flypaper effect tertinggi dari sampel tersebut terjadi di oleh Kabupaten Supriori Provinsi Papua sebesar 315.777, sedangkan Flypaper Effect

terendah terjadi di Kabupaten Kutai sebesar 495 (data terlampir). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Supriori sebagian besar dana untuk belanja daerah berasal dari dana alokasi umum.

Analisis Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan jumlah anggaran pengeluaran baik yang langsung maupun yang tidak langsung terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan.

Belanja Daerah tertinggi dari sampel tersebut ada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.118.943.000.000,- sedangkan Belanja Daerah terendah ada di Kabupaten Sabu Raijua yang terletak di Provinsi sebesar Rp. 40.752.000.000,- (data terlampir).

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan flypaper effect terhadap belanja daerah maka dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan yang dapat dilihat dari table ANOVA.

Tabel 2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3924074886162.844	4	981018721540.711	257.488	.000 ^a
	Residual	407665867173.911	107	3809961375.457		
	Total	4331740753336.755	111			

a. Predictors: (Constant), FPE_X4, DAK_X2, DAU_X1, PAD_X3

b. Dependent Variable: Belanja Daerah_Y

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil analisis diatas menggunakan ANOVA menghasilkan analisis uji F sebesar 257.488 dimana model ini menunjukkan hasil yang signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa alat analisis regresi berganda sangat cocok digunakan memakai alat analisis ini. biasanya dapat digunakan untuk melihat Hasil yang signifikan dalam melihat Pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel dengan tingkat signifikan 0,000. seperti tabel ANOVA diatas.

Terlihat dari angka F 257.488 dengan Sig.0.000 < 0,05: Signifikan positif, berarti secara bersama-sama perubahan keempat variabel DAU (X₁), DAK (X₂) PAD (X₃) dan FPE (X₄). mampu menjelaskan perubahan variabel Y(Belanja Daerah). Dimana [lihat R Square 0,906] atau 90,6% sedang sisanya 9,4% [100% - 90,6%] dijelaskan oleh variabel lain selain variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄. Dari hasil analisis ini telah menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk teknik analisis ini adalah cocok.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi berganda dipakai untuk menguji pengaruh variable independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan flypaper effect terhadap belanja daerah. Dari hasil pengolahan didapatkan hasil analisis regresi sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	468144.411	27503.474		17.021	.000			
DAU_X1	.936	.057	.672	16.487	.000	.847	.529	1.890
DAK_X2	1.131	.697	.059	1.622	.108	.155	.660	1.516
PAD_X3	.818	.259	.130	3.162	.002	.292	.524	1.908
FPE_X4	-4782.521	286.078	-.611	-16.718	.000	-.850	.658	1.521

a. Dependent Variable: Belanja Daerah_Y

Sumber: data diolah

Dari table diatas maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 468144.411 + 0.936 X_1 + 1.131X_2 + 0.818X_3 - 4782.521X_4$$

Dimana :

- Y = belanja daerah (Belanja)
- X₁ = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X₂ = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X₃ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X₄ = Flypaper Effect (FPE)

Koefisien yang didapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Konstanta adalah sebesar Rp. 468144,411 menunjukkan rata-rata peningkatan belanja daerah jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Flypaper Effect tidak berubah. Dana alokasi umum memiliki koefisien bertanda positif

sebesar 0.936, dimana artinya setiap peningkatan dana alokasi umum maka akan meningkatkan belanja daerah, dengan asumsi variable bebas lain tidak berubah. Dana alokasi khusus memiliki koefisien bertanda positif sebesar 1.131, dimana artinya setiap peningkatan dana alokasi khusus maka akan meningkatkan belanja daerah, dengan asumsi variable bebas lain tidak berubah. Pendapatan asli daerah memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0.818, dimana artinya setiap peningkatan Pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja daerah, dengan asumsi variable bebas lain tidak berubah. Flypaper Effect memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 4782.521, dimana artinya setiap penurunan Flypaper Effect maka akan meningkatkan belanja daerah, dengan asumsi variable bebas lain tidak berubah

Hasil Uji Hipotesis

Sehingga hipotesis yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari tabel 4.8 diketahui nilai t_{hitung} sebesar 16.487 dengan signifikan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima. Seperti pada penelitian Maimunah (2009:12) yang juga menghasilkan pengaruh DAU yang besar terhadap tingkat Belanja Daerah.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari table 3 diketahui nilai t_{hitung} sebesar 1.622 dengan signifikan 0.108 yang lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah ditolak. Sehingga diambil kesimpulan bahwa DAK tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat Belanja Daerah, hal ini sesuai dengan sifat dari DAK sendiri yang merupakan dana yang diberikan untuk keperluan khusus bukan untuk belanja rutin.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari tabel 3 diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3.162 dengan signifikan 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah diterima. Walaupun pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah diterima, tetapi nilai t_{hitung} jauh lebih kecil dibandingkan dengan DAU, sehingga diambil kesimpulan bahwa PAD hanya memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan untuk Belanja Daerah, jika dibandingkan dengan DAU.

Pengaruh FPE terhadap Belanja Daerah

Uji t dapat digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara parsial DAU terhadap belanja Daerah. Dari table 3 diketahui nilai t_{hitung} sebesar -16.718 dengan signifikan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa FPE berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima.

Analisa Flypaper Effect

Sedangkan dari hasil hipotesis diatas untuk mengetahui apakah terdapat Flypaper Effect terhadap Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui bila:

1. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah.

Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa t hitung dari Dana Alokasi Umum sebesar 16.487 sedangkan t hitung Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.162 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum lebih mampu menstimulus daerah dalam hal ini kota/kabupaten di Indonesia daripada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Maka terbukti terjadi Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Hal ini menjadi suatu pembuktian bahwa kabupaten /kota di Indonesia lebih memilih Dana Alokasi Umum sebagai sumber dana untuk belanja daerah daripada

menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meringankan masyarakat dari beban pajak yang harus ditanggung, walaupun didalam Pendapatan Asli Daerah terdapat komponen pajak daerah yang juga ditanggung masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan Maimunah (2009:12) yang menghasilkan besarnya pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah. Pemerintah Daerah lebih memilih memakai DAU dibandingkan PAD disebabkan nilai PAD yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan Belanja Daerah. Bahkan ada beberapa daerah yang PADnya kecil disebabkan kurang tergalinya potensi daerah dalam mendapatkan PAD.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pada Dana Alokasi Khusus juga terjadi Flypaper Effect, dilihat dari tabel 3 t hitung untuk Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah sebesar 1.622 lebih kecil dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan t hitung sebesar 3.162, sehingga untuk Dana Alokasi Khusus tidak terjadi Flypaper Effect karena pengaruhnya terhadap Belanja Daerah lebih kecil daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah.

“Hal ini sesuai dengan dasar dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dimana Dana Alokasi Khusus diberikan oleh pusat ke daerah sesuai dengan kebutuhan diluar belanja program dan belanja rutin, bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik” (Ndadari dan Adi, 2008 dalam Maimunah, 2009).

“Dana Alokasi Khusus digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap”. Menurut Abdullah dan Halim (2001) “aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda”. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2001) menjelaskan bahwa “biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Oleh karenanya tidak terjadi Flypaper Effect pada Dana Alokasi Khusus”.

Dana Alokasi Khusus yang diberikan karena ada program khusus dalam rangka peningkatan sarana prasarana Kabupaten atau Kota, bahkan bersumber dari dana

reboisasi membuat DAK tidak signifikan karena dana tersebut tidak setiap kota ataupun kabupaten yang mendapatkan serta nilainya yang relatif kecil dibandingkan dengan belanja daerah yang dibutuhkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah Kabupaten se-Indonesia maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan Belanja Daerah, sehingga semakin bertambahnya Dana Alokasi Umum, maka bertambah besar pula pengeluarannya. Dan didapatkan bahwa Flypaper Effect terjadi pada Dana Alokasi umum karena semakin besar Dana Alokasi Umum akan semakin besar pula Belanja Daerahnya. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah lebih banyak memakai dana grants atau dana perimbangan untuk pengelaran atau belanja daerahnya, (2) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah karena Dana Alokasi khusus ini ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang akan dipergunakan untuk kebutuhan khusus bagi pembangunan tiap daerah, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan APBN, (3) Pendapatan asli Daerah mempunyai pengaruh kecil terhadap Belanja Daerah, dimana hal ini menunjukkan, bahwa tiap daerah kurang mempergunakan sumber daya daerahnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya sebagai sumber utama Belanja Daerah, sehingga tidak terjadi kemandirian dari tiap daerah, (4) Flypaper Effect berpengaruh negative terhadap Belanja Daerah, karena Flypaper effect ini sendiri merupakan perbandingan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah yang menghasilkan prosentase tinggi, sehingga pengaruh Flypaper Effect menghasilkan nilai negative.

Saran

Diharapkan tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia ini dapat meminimalkan pemakaian Dana Alokasi Umum dan memaksimalkan penggalan sector-sektor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercipta kemandirian.

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah, selain menggunakan data yang tersedia di laman Departemen Keuangan. Sebaiknya dilakukan juga observasi kepada pihak yang berwenang di tiap daerah, dalam hal ini pemda sehingga informasi yang didapat bias lebih mendalam dan akurat.

Daftar Pustaka

- Fischer, Ronald C. 1996. *State and local public finance*. Chicago: Irwin.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair et al., (1998), *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : New Jersey.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357.
- Maimunah Mutiara, 2009. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota / Kabupaten Di Pulau Sumatera*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Sumarsono, 2007. *Metode Penelitian Akuntansi (Beberapa contoh Interpretasi hasil pengolahan data)*, Penerbit Unesa University Press.
- Oates, Wallace. 1999. *An essay of fiscal federalism*. *Journal of Economics Literature* 37: 1120-1149.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29/2002 tentang pedoman *Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- <http://www.djk.depkeu.go.id/>

Lampiran

Data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Flypaper Effect, Belanja Daerah (dalam jutaan rupiah)

Nama Daerah	Dana alokasi umum	Dana alokasi khusus	PAD	Flypaper effect	Belanja Daerah
Kab. Aceh Barat	259,464	25,252	16,449	83.629	310,257
Kab. Aceh Besar	243,367	12,008	14,464	64.008	380,212
Kab. Aceh Singkil	160,446	10,258	5,655	81.339	197,257
Kab. Aceh Timur	310,700	38,568	8,246	72.279	429,859
Kota Sabang	177,576	5,969	8,554	107.593	165,044
Kab. Aceh Tamiang	212,242	10,612	8,953	82.025	258,754
Kota Medan	687,253	20,160	321,589	60.221	1,141,213
Kota Tebing Tinggi	190,048	5,342	16,379	124.527	152,617
Kab. Pakpak Barat	139,817	7,383	2,876	116.581	119,931
Kab. Nias Selatan	231,573	18,665	5,582	131.978	175,463
Kab. Nias Utara	90,469	11,635	771	143.815	62,907
Kab. Agam	362,923	16,540	12,604	82.188	441,576
Kab. Padang Pariaman	348,221	15,662	16,368	89.376	389,613
Kab. Pasaman	269,393	10,886	10,951	91.760	293,584
Kab. Solok	337,768	15,145	14,388	104.428	323,447
Kota Bukit Tinggi	201,922	5,456	25,269	89.499	225,614
Kota Payakumbuh	205,659	3,545	20,272	86.004	239,128
Kota Sawahlunto	168,395	5,723	15,895	95.851	175,685
Kota Pariaman	197,241	5,781	10,399	111.995	176,116
Kab. Pasaman Barat	282,377	15,037	13,935	109.633	257,567
Kab. Indragiri Hulu	183,418	4,318	25,476	43.566	421,017
Kab. Kampar	100,896	11,879	81,271	10.665	946,037
Kab. Pelalawan	156,305	13,535	29,478	34.771	449,528
Kab. Rokan Hilir	-	6,403	42,786	0.000	575,984
Kab. Siak	-	4,388	84,923	0.000	821,991
Kota Pekanbaru	233,570	3,455	120,666	31.604	739,042
Kab. Lahat	264,042	41,044	22,158	56.201	469,816
Kab. Musi Banyuasin	66,880	14,977	33,302	9.534	701,506
Kab. Musi Rawas	291,572	15,785	26,215	51.505	566,110
Kab. Muara Enim	309,899	4,453	40,442	56.207	551,350
Kab. Ogan Komering Ulu	248,667	-	27,641	55.656	446,789
Kota Palembang	580,489	8,528	205,747	69.688	832,982
Kota Lubuk Linggau	174,955	5,795	11,031	69.786	250,702

Kab. OKU Timur	318,348	15,159	14,986	79.231	401,798
Kab. OKU Selatan	217,521	13,802	8,231	80.295	270,903
Kab. Bengkulu Selatan	237,901	10,795	7,472	90.798	262,012
Kab. Kaur	182,178	13,537	4,540	90.033	202,347
Kab. Bengkulu Tengah	158,309	13,158	3,051	110.296	143,531
Kab. Lampung Selatan	421,561	21,393	17,971	98.232	429,150
Kab. Lampung Tengah	647,957	26,143	37,856	83.448	776,476
Kab. Way Kanan	260,754	30,899	4,460	89.354	291,821
Kab. Mesuji	92,638	3,998	1,199	83.119	111,452
Kab. Ciamis	722,834	27,676	39,522	70.470	1,025,735
Kab. Cirebon	722,750	24,357	99,151	75.606	955,942
Kab. Tasikmalaya	717,781	45,409	36,409	79.975	897,506
Kota Cirebon	318,270	5,890	31,114	83.027	383,335
Kota Sukabumi	253,811	6,927	73,665	66.814	379,874
Kota Tasikmalaya	383,682	8,638	26,558	70.496	544,262
Kab. Kebumen	535,665	19,746	41,641	94.047	569,571
Kab. Wonogiri	514,163	21,704	45,073	83.196	618,012
Kab. Wonosobo	331,814	16,600	36,603	82.596	401,732
Kota Magelang	216,761	5,319	44,035	82.038	264,219
Kota Surakarta	392,474	8,736	79,744	77.492	506,469
Kab. Kulon Progo	342,745	12,484	32,991	90.698	377,896
Kota Yogyakarta	329,537	4,080	126,428	72.134	456,843
Kab. Banyuwangi	634,914	24,479	58,230	85.514	742,471
Kab. Bojonegoro	486,470	17,212	53,649	76.894	632,646
Kab. Bondowoso	399,850	17,445	28,999	85.279	468,874
Kab. Mojokerto	441,468	11,612	47,280	77.714	568,069
Kab. Pasuruan	530,100	20,385	68,986	81.396	651,257
Kab. Sidoarjo	555,280	16,903	244,955	54.499	1,018,880
Kota Pasuruan	193,303	4,740	59,774	73.255	263,878
Kota Surabaya	543,777	17,966	647,173	25.663	2,118,943
Kab. Ketapang	506,723	15,424	21,887	109.267	463,749
Kota Singkawang	224,606	7,476	17,280	97.318	230,796
Kab. Kotawaringin Barat	314,020	10,119	28,678	92.739	338,606
Kab. Seruyan	150,339	9,715	3,488	94.553	158,999
Kab. Sukamara	21,653	-	1,809	22.417	96,591
Kab. Lamandau	214,524	9,655	5,719	95.049	225,698
Kab. Tabalong	224,520	12,284	24,068	59.977	374,346
Kab. Tanah Laut	242,668	16,062	42,061	80.854	300,130
Kota Banjarbaru	185,208	5,908	20,456	67.485	274,443

Kota Banjarmasin	356,837	10,750	57,007	68.696	519,445
Kab. Balangan	160,392	9,358	16,160	65.098	246,386
Kab. Berau	133,599	4,922	75,307	21.101	633,141
Kab. Kutai	6,609	4,549	70,162	0.495	1,335,986
Kab. Kutai Barat	211,872	33,728	15,881	28.311	748,380
Kab. Malinau	260,120	11,116	68,018	43.564	597,095
Kota Balikpapan	64,157	1,948	104,650	7.461	859,934
Kab. Tana Tidung	145,493	4,632	27,294	69.376	209,716
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	145,631	14,067	1,525	126.574	115,056
Kab. Banggai	388,418	14,431	15,710	97.703	397,549
Kab. Banggai Kepulauan	224,686	9,936	3,283	119.391	188,194
Kab. Buol	220,794	10,504	8,302	99.853	221,119
Kab. Toli -Toli	239,351	11,834	12,933	102.304	233,961
Kab. Donggala	293,279	15,575	15,910	102.397	286,413
Kab. Morowali	295,447	12,237	13,190	75.454	391,557
Kab. Poso	322,663	45,729	24,465	77.019	418,940
Kota Palu	317,078	20,197	35,301	81.799	387,632
Kab. Parigi Moutong	320,004	13,172	9,261	96.509	331,580
Kab. Sigi	274,670	8,987	7,943	93.460	293,891
Kab. Gowa	376,699	17,547	31,920	82.555	456,301
Kab. Maros	283,815	37,744	24,038	106.310	266,970
Kab. Selayar	215,979	10,701	8,844	100.168	215,617
Kota Palopo	225,354	6,606	21,801	93.880	240,043
Kab. Toraja Utara	207,843	13,807	5,260	108.013	192,423
Kab. Badung	109,933	1,085	730,073	14.217	773,243
Kab. Bangli	252,905	8,831	10,956	87.864	287,838
Kab. Gianyar	322,911	13,129	105,256	68.251	473,126
Kab. Klungkung	238,052	8,850	20,533	91.859	259,148
Kab. Lombok Tengah	469,019	17,874	28,331	87.523	535,878
Kab. Sumbawa	363,623	16,969	22,192	90.226	403,011
Kab. Ngada	185,546	12,469	10,821	97.858	189,609
Kab. Sumba Barat	184,656	15,028	15,197	116.242	158,855
Kab. Timor Tengah Utara	222,336	10,487	10,093	75.229	295,545
Kota Kupang	284,052	9,304	24,418	87.126	326,025
Kab. Nagekeo	171,568	9,579	5,853	100.293	171,067
Kab. Sabu Raijua	48,196	9,026	703	118.790	40,572
Kota Ambon	304,726	8,535	23,400	91.880	331,655
Kab. Merauke	585,632	28,130	53,695	94.772	617,939
Kab. Nabire	325,055	36,346	11,393	95.999	338,603

Kab. Pegunungan Bintang	383,295	49,144	15,553	107.427	356,797
Kab. Tolikara	277,749	29,079	10,658	78.865	352,184
Kab. Mappi	357,526	13,068	14,253	129.913	275,205
Kab. Asmat	445,272	45,004	14,151	101.797	437,412
Kab. Supiori	228,859	7,741	493	315.777	72,475
Kota Ternate	234,404	18,490	14,978	84.516	277,350
Kab. Halmahera Barat	215,192	36,911	4,122	81.231	264,915
Kota Pangkal Pinang	197,245	5,961	21,784	82.224	239,888
Kab. Bangka Selatan	188,913	7,813	8,747	74.538	253,446
Kab. Bintan	91,862	8,012	102,414	23.902	384,330